

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan menjadi sebuah jembatan yang menghubungkan keperluan bisnis. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menjelaskan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan, pengguna laporan keuangan terdiri dari investor, debitor, kreditor, pemerintah dan masyarakat (Sanjaya & Ulupui, 2016). Laba dalam laporan keuangan menjadi perhatian utama karena mencerminkan profitabilitas dan kinerja perusahaan, yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pembiayaan. Selain itu, laba juga menggambarkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya (Wardyani & Khalifaturofiah, 2023).

Laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen utama, seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Kieso et al. (2017, sebagaimana dikutip dalam Salsabil & Wijayanti, 2024) laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang biasanya digunakan oleh investor dan kreditor untuk mengevaluasi hal-hal atau risiko yang tidak pasti yang mungkin terjadi di masa mendatang, memberikan referensi dalam memperkirakan kinerja, dan menilai

kinerja. Kecenderungan untuk lebih berfokus pada laba ini diakui oleh para eksekutif, terutama manajer, yang percaya bahwa laba dapat mencerminkan kinerja perusahaan (Garel et al., 2021). Laba sendiri dibedakan menjadi laba bruto, laba operasi, dan laba bersih, yang masing-masing mencerminkan keuntungan pada level yang berbeda (Sasmita et al., 2023).

Tekanan untuk memenuhi ekspektasi laba, mendorong manajemen untuk menciptakan tren positif dalam laba perusahaan pada setiap periode. Pasar modal juga berperan penting dalam mendorong perusahaan untuk mempertahankan kinerja yang baik, terutama terkait dengan laba. Investor di pasar modal sangat memperhatikan laba yang dilaporkan, karena laba dianggap sebagai indikator utama kesehatan keuangan perusahaan. Ketika suatu perusahaan tidak mampu melakukannya, manajemen akan menyiapkan laporan keuangan, terutama pengaruhnya terhadap laba melalui manajemen laba (Harris et al., 2022). Menurut Irman et al. (2023) ketika perusahaan terlibat dalam manajemen laba yang tidak menguntungkan, hal ini dapat mengurangi kepercayaan pasar terhadap perusahaan dan bahkan dapat berdampak pada seluruh industri atau sektor ekonomi. Keyakinan yang hilang berdampak pada nilai saham perusahaan, dan juga kemampuan mereka untuk menarik investor baru atau mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan (Wijayanti, 2025).

Sulistyanto (2008) berpendapat manajemen laba atau *earning management* ialah suatu upaya mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan untuk mengelabui *stakeholders* yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Bagi pihak yang menganggap manajemen laba sebagai bentuk kecurangan berpegang pada

pandangan bahwa tindakan tersebut melibatkan intervensi dan upaya untuk menyesatkan. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa manajemen laba bukan merupakan kecurangan, karena intervensi yang dilakukan masih berada dalam batasan standar akuntansi yang sah (Maharany et al., 2024).

Menurut Santi dan Wardani (2018) terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam mengelola laba. Pertama adalah dengan merekayasa akrual tanpa berdampak pada aliran kas perusahaan (manajemen laba akrual), dan kedua adalah melalui tindakan nyata yang berdampak pada aliran kas perusahaan (manajemen laba riil). Selain itu, pengelolaan laba oleh sebuah perusahaan dapat bersifat oportunistik atau efisien (informatif). Ketika pengelolaan laba bersifat oportunistik, keputusan yang diambil oleh manajer cenderung menguntungkan pihak manajer sendiri. Namun, jika pengelolaan laba bersifat efisien (informatif), maka keputusan manajer lebih cenderung menguntungkan pemegang saham perusahaan. Skandal akuntansi di perusahaan besar telah menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas informasi keuangan serta minat akademisi terhadap berbagai aspeknya, di antaranya manajemen laba (*earnings management/EM*). Manajer dapat mempraktikkan manajemen laba akrual (*accrual earnings management/AEM*) dengan memanfaatkan karakteristik sistem akuntansi akrual (Gavana et al., 2022).

Fenomena manajemen laba terjadi pada kasus PT Timah Tbk, dimana terjadi kesalahan pencatatan laporan keuangan PT Timah Tbk periode tahun 2018. Dilansir dari Kompas.com (16 April 2020), manajemen PT Timah Tbk melaporkan laba bersih sebesar Rp 531,35 miliar, padahal laba sebenarnya

hanya Rp 132,29 miliar. Terjadi *mark up* sebesar Rp 399,06 miliar. Kasus ini muncul karena manajemen perusahaan tidak mencatat harga pokok penjualan atas penjualan logam timah sebesar Rp 640 miliar. Pencatatan yang kurang dari saldo Properti investasi sebesar Rp 199 miliar dan pencatatan yang lebih dari saldo aktiva tetap sebesar Rp 25 miliar. Metode pengakuan pendapatan dari penjualan bangunan rumah yang tidak tepat, pajak dibayar dimuka yang tidak tertagih, serta transaksi antar perusahaan dalam satu grup dan sebagainya (Jatmiko, 2020)

Terdapat tiga komponen laporan keuangan yang salah pencatatan, yaitu aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan laba yang terdiri dari pendapatan dan biaya. Pertama adalah komponen aktiva lancar, harga pokok penjualan (HPP) menjadi hal yang mempengaruhi persediaan, jika tidak mencatat HPP sebesar Rp 640 miliar maka laba ditingkatkan secara tidak wajar, karena HPP yang seharusnya mengurangi laba tidak dicatat. Selanjutnya pajak dibayar dimuka yang tidak tertagih menandakan perusahaan tetap mencatat pajak sebagai aset yang seharusnya sudah menjadi beban atau kerugian yang dapat mengurangi laba. Komponen kedua adalah aktiva tidak lancar, terdapat pencatatan yang kurang dari properti investasi sebesar Rp 199 miliar artinya perusahaan mencatat lebih rendah dari seharusnya dan hal ini dapat berhubungan dengan arus kas. Selanjutnya terdapat pencatatan yang lebih dari aktiva tetap sebesar Rp 25 miliar yaitu dengan menaikkan nilai aktiva tetap, perusahaan terlihat lebih besar dan lebih sehat secara keuangan, sekaligus bisa menarik investor atau memperbesar kapasitas pinjaman. Pada komponen laba khususnya

pendapatan, metode pengakuan pendapatan dari penjualan rumah yang tidak tepat dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya laba, serta transaksi antar perusahaan dalam satu grup dapat menimbulkan kecurigaan atas memindahkan laba dari satu entitas ke entitas lain.

Kasus ini termasuk dalam jenis manajemen laba dengan model *income maximization*, dimana perusahaan berusaha meningkatkan laba pada laporan keuangan agar tampak lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Manajemen laba juga dilatarbelakangi oleh motivasi manajemen, yang pertama adalah motivasi bonus, manajemen ingin menunjukkan kinerja keuangan yang tinggi untuk mendapatkan bonus atau insentif. Selanjutnya motivasi pasar modal yang ingin menampilkan laporan keuangan yang sehat bisa menjaga harga saham tetap tinggi atau menarik investor baru. *Restatement* signifikan yang dilakukan oleh manajemen TINS dengan laba bersih disajikan kembali dari Rp 531,135 miliar menjadi Rp 132,29 miliar pada tahun 2018. Penyajian kembali tersebut mengakibatkan penurunan laba bersih sebesar 73,76%. Harga saham TINS melonjak tajam sebesar 158,87% sebelum restatement, mencapai IDR 1,605 per saham pada 25 Februari 2019 dari IDR 620 per saham sebelum restatement dilakukan (Christian et al., 2023).

Fenomena mengenai manajemen laba yang menarik untuk dibahas selanjutnya adalah kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2018. Dikutip dari Kompas.com (18 Agustus 2019), pada 31 Oktober 2018, manajemen Garuda dan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) mengadakan perjanjian kerja sama yang telah diamandemen, terakhir dengan

amandemen II tanggal 26 Desember 2018, mengenai penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten. Mahata akan melakukan dan menanggung seluruh biaya penyediaan, pelaksanaan, pemasangan, pengoperasian, perawatan dan pembongkaran dan pemeliharaan termasuk dalam hal terdapat kerusakan, mengganti dan/atau memperbaiki peralatan layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten. Garuda mengakui penghasilan dari perjanjiannya dengan Mahata sebagai suatu penghasilan dari kompensasi atas Pemberian hak oleh Garuda ke Mahata (Catatan Lapkeu 47 huruf e). Sehingga, menurut Standar Akuntansi Keuangan, pengakuan dan pengukuran penghasilan yang berasal dari imbalan yang diterima dibayarkan untuk penggunaan aset Garuda oleh Mahata harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam PSAK 23, yaitu diklasifikasikan sebagai pendapatan royalti.

Dalam hal ini, Komisaris Garuda Chairal Tanjung dan Dony Oskaria, perwakilan dari PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd selaku pemilik dan pemegang 28,08 persen saham Garuda Indonesia berpendirian senada, bahwa ini merupakan pendapatan royalti. Komisaris Garuda hanya keberatan dengan pengakuan (rekognisi) pendapatan transaksi sebesar 239,94 juta dollar AS yang tertuang di dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan antara PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) dan PT Citilink Indonesia selaku anak usaha Garuda Indonesia. Keberatan itu disampaikan keduanya kepada manajemen pada 2 April 2019 lewat sepucuk surat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Ringkasnya, keberatan keduanya didasarkan pada PSAK 23 dan Perjanjian Mahata. Menurut Chairal dan Dony, tidak dapat diakuinya pendapatan tersebut karena hal ini bertentangan dengan PSAK 23 paragraf 28 dan 29. Menurut paragraf 28, pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui dengan dasar yang dijelaskan di paragraf 29, jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Sedangkan paragraf 29 sendiri menegaskan royalti diakui dengan dasar sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Dalam lampiran PSAK 23 paragraf 20, dielaborasi dalam ilustrasi makna dari PSAK 23 paragraf 28 tersebut bahwa royalti akan diterima atau tidak diterima bergantung kepada kejadian suatu peristiwa masa depan. Dalam hal ini, pendapatan hanya diakui jika terdapat kemungkinan besar bahwa royalti akan diterima.

Dari keberatan yang disampaikan oleh komisaris, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Komisaris setuju bahwa penghasilan yang diperoleh/akan diperoleh Garuda dari perjanjiannya dengan Mahata adalah penghasilan royalti sehingga tunduk dalam PSAK 23. Komisaris hanya keberatan kepada saat pengakuan penghasilan tersebut yang menurut mereka Garuda belum saatnya mengakui penghasilan sama sekali. Dengan kata lain, pada tataran klasifikasi, Direksi dan Komisaris menunjuk 'makhluk' yang sama, yakni royalti.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan OJK dan Kemenkeu sendiri ternyata berbeda jauh dengan keberatan yang disampaikan oleh kedua komisaris Garuda,

yang merupakan pangkal kekisruhan ini. OJK/Kemenkeu mengidentifikasi ‘makhluk’ yang berbeda dengan Komisaris Garuda dan Direksi. Alih-alih memperlakukan transaksi ini sebagai royalti, OJK dan Kemenkeu mengakui itu sebagai pendapatan sewa. Jadi berbeda klasifikasi. OJK/Kemenkeu sendiri memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik (*public expose*) atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 dimaksud paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi, atas pelanggaran Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM), Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang Sewa.

Standar Akuntansi Keuangan memberikan pedoman bagi cara pengakuan dan saat pengakuan penghasilan bagi manajemen suatu perusahaan. Manajemen dapat memilih struktur transaksi bisnis yang akan dilakukannya dengan pihak lain untuk dapat memenuhi suatu Standar Akuntansi Keuangan tertentu. Standar Akuntansi Keuangan memungkinkan manajemen mengakui suatu penghasilan sekaligus dalam suatu tahun, ataupun tersebar selama jangka waktu perjanjian transaksi, berdasarkan kondisi-kondisi yang tercantum dalam perjanjian. Standar Akuntansi Keuangan juga mensyaratkan perusahaan mengakui

penghasilannya berbasis akrual, yaitu penghasilan dapat diakui walaupun arus kas belum diterima sebagian/seluruhnya oleh perusahaan. Basis ini berbeda dengan basis kas yang mengakui penghasilan perusahaan hanya apabila arus kas sudah diterima oleh perusahaan.

Dari perspektif ini, apa yang dilakukan manajemen mendapat legitimasi teoretik-legal. Hal ini memberikan ruang bagi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengakui penghasilan sekaligus dalam satu tahun, atau mengakui penghasilan secara tersebar dalam jangka waktu perjanjian. Keduanya dapat diambil demi memengaruhi jumlah total laba/rugi bersih yang akan diakui perusahaan dalam tahun diakuinya penghasilan. Salah satu motivasi yang paling mungkin adalah bonus yang diberikan perusahaan kepada manajemen apabila perusahaan dapat mencapai tingkat laba tertentu, atau kebutuhan akan performa yang bagus di mata publik. Hal yang amat wajar dalam sebuah bisnis yang mengandaikan keberlanjutan (Prastowo, 2019).

Kasus manajemen laba juga masih terjadi pada tahun 2024, yaitu *startup* akuakultur eFishery. Dilansir dari Bloomberg News (15 April 2025) pendiri dan mantan CEO eFishery, Gibran Huzaifah akhirnya mengakui telah memoles laporan keuangan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan dan menolak tuduhan telah mencuri dana investor. Aksi ini dimulai pada akhir tahun 2018, ketika itu eFishery memiliki 100 karyawan dan tinggal tiga bulan lagi perusahaan akan kehabisan uang. Dalam waktu satu jam, Gibran telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh kerja kerasnya selama lima

tahun - mengubah bisnisnya menjadi pemenang, setidaknya di atas kertas. Gibran mengirimkan laporan tersebut kepada para investor. Usai membaca catatan hasil kinerja, investor senang karena memperlihatkan tren bisnis yang membaik. Apa yang terjadi selanjutnya, mereka menyumbang lebih banyak uang tunai, tanpa menyadari bahwa angka-angka itu direkayasa, membantu Gibran menghindari kebangkrutan perusahaan (Olivia et al., 2025).

Dilansir dari Katadata.co.id (16 April 2025), Gibran menyajikan keputusan yang dihadapinya sebagai masalah moralitas antara bersikap jujur dan berakhir bangkrut atau membesar-besarkan angka dan tetap mempertahankan bisnis untuk diri sendiri, karyawan, nelayan dan pembudi daya. Terdapat 3 cara manajemen eFishery melakukan praktik manajemen laba, pertama dengan memindahkan bisnis petani kedalam platform eFishery dengan menawarkan pembayaran 2% hingga 3%, ketika transaksi tersebut dipindahkan ke laporan keuangan eFishery, pendapatan perusahaan rintisan itu tampak melonjak 20-30% menunjukkan momentum pertumbuhan. Kedua, dengan mendirikan jaringan anak usaha dan mengendalikan 5.000 akun petani lewat bisnis baru ini yang digunakan untuk transaksi seperti membeli pakan ikan dan menjual ikan. Selain itu terdapat dua laporan keuangan eFishery satu untuk internal dan satu lagi yang telah digelembungkan untuk investor. Sebagian besar karyawan hanya memiliki catatan internal dan tidak pernah tahu bahwa pengelola keuangan eksternal mempunyai data yang sama sekali berbeda, termasuk beberapa manajer senior sudah mengetahui angka-angka yang digelumbungkan tersebut.

Pada tahap ini, dengan investor yang tertipu oleh kisah pertumbuhan yang melambat untuk berkonsentrasi pada keberlanjutan finansial menjelang pencatatan saham perdana alias *Initial Public Offering* (IPO), Gibran membuat rencana untuk memperbaiki bisnis dengan nama proyek MEGA — *Make eFishery Great Again*. “Itu adalah upaya sia-sia,” kata seorang mantan karyawan dikutip dari Bloomberg. Alasannya, dari lebih dari 28 ribu petani ikan dan udang di sistem Kabayan, sekitar setengahnya tidak aktif. Di tengah upaya itu, pemicu keruntuhan eFishery muncul dengan adanya pengaduan *whistleblower* yang menuduh adanya pelanggaran keuangan menunjukkan perbedaan pendapatan dan jumlah produk teknologi yang digunakan oleh petani, yang dikirim ke anggota dewan pada akhir November 2024.

Berdasarkan hasil laporan sementara FTI Consulting setebal 52 halaman yang diedarkan di antara investor dan ditinjau oleh Bloomberg News pada Januari, menyebutkan manajemen menggelembungkan laporan keuangan eFishery. eFishery menyampaikan kepada investor bahwa perusahaan untung US\$ 16 juta atau Rp 261,3 miliar dan meraup pendapatan US\$ 752 juta atau Rp 12,3 triliun selama Januari – September 2024. Padahal sebenarnya eFishery merugi US\$ 35,4 juta atau Rp 578 miliar. Pendapatan *startup* perikanan ini diperkirakan US\$ 157 juta atau Rp 2,6 triliun. Secara keseluruhan, pembukuan internal menunjukkan kerugian yang dipertahankan eFishery sekitar US\$ 152 juta atau selama Januari - November 2024. Total aset perusahaan US\$ 220 juta, termasuk US\$ 63 juta dalam bentuk piutang dan US\$ 98 juta berupa investasi.

Selain itu, eFishery melaporkan jumlah mitra pembudidaya ikan lebih dari 400 ribu. Namun ternyata hanya 24 ribu (Setyowati, 2025).

Berdasarkan analisis peneliti, kasus eFishery terdapat campuran dua pendekatan manajemen laba yaitu melalui manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. Manajemen laba akrual yaitu mengubah pengakuan pendapatan dan beban agar terlihat lebih baik di laporan keuangan. Sedangkan manajemen laba riil dilakukan melalui pengelolaan penjualan dengan memberikan diskon harga agar petani dapat memindahkan bisnis mereka ke *platform* efishery membuat pendapatan perusahaan melonjak 20%-30%. Menggunakan metode *income maximazation*, dilatarbelakangi *bonus plan hypothesis* agar lebih mudah menarik investasi lanjutan, yang bisa menyelamatkan bisnis dan mungkin juga menyelamatkan posisinya sebagai CEO serta nilai saham pribadinya. Selain itu terdapat motivasi manajemen laba yaitu *Initial Public Offering* (IPO), perusahaan yang akan *go public* belum memiliki nilai dasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan *go public* melakukan manajemen laba dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan (Scott, 2012:435).

Manajemen laba yang dilakukan perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, dimana faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor non keuangan dan faktor keuangan. Faktor keuangan merupakan informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan perusahaan yang menjadi faktor atau motivasi perusahaan dalam melakukan praktik manajemen laba (Ayuwardani & Isroah, 2018). Faktor keuangan seperti *financial distress*.

Sedangkan faktor non keuangan adalah faktor selain informasi keuangan atau informasi yang didapatkan di luar data keuangan yang disajikan perusahaan, dimana informasi ini nantinya yang menjadi motivasi perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Faktor non keuangan antara lain adalah *environmental, social and governance* (ESG) dan kepemilikan manajerial. Penelitian ini akan menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi manajemen laba bila didasarkan pada informasi keuangan (faktor keuangan) dan faktor yang tidak dapat diukur melalui informasi keuangan (faktor non keuangan).

Faktor pertama yang berdampak pada praktik manajemen laba adalah *environmental, social, and governance* (ESG). Sejak Hari Bumi pada tanggal 22 April 2016, 171 negara menandatangani "Perjanjian Iklim Paris" di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), isu ESG menjadi semakin mendesak dan penting. Hal ini juga didukung oleh regulasi POJK Nomor 51 Tahun 2017 dan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan perusahaan *go public* di Indonesia untuk membuat laporan keberlanjutan. ESG merujuk pada kegiatan yang terkait dengan operasional perusahaan yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Menurut Antonius dan Ida (2023), salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam investasi jangka panjang adalah kemampuan mereka dalam mengimplementasikan dan menerapkan kebijakan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Penilaian performa organisasi berdasarkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) semakin menjadi fokus bagi investor sebagai cara untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Dalam konteks bisnis yang kompleks, mengelola ESG bukan hanya sebagai tanggung jawab sosial, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap performa perusahaan. Selain menarik bagi investor, perusahaan yang menunjukkan komitmen sosial juga mampu mempengaruhi keputusan investasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan skor ESG yang lebih tinggi cenderung lebih sedikit melakukan manajemen laba (Gavana et al. (2022); Andriani dan Arsjah (2022); Satya dan Amertha (2013); Chen dan Hung (2020); Nurrahman dan Mita (2022); Velte (2024); Atiqah dan Saputro (2024)). Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan dengan kinerja dan pengungkapan ESG yang kuat cenderung memiliki struktur tata kelola yang kuat, pelaporan yang transparan, dan kontrol internal yang lebih baik. Faktor-faktor ini dapat menghalangi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. Praktik seperti ESG atau CSR dalam sebuah perusahaan seringkali menjadi penanda dari komitmen etika dan perilaku yang positif. Keterlibatan dalam kegiatan corporate social responsibility sering dikaitkan dengan praktik manajemen laba yang lebih terkendali, mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi umumnya menghindari taktik manajemen laba. Pengungkapan ESG dan memberikan CSR mendorong integritas, etika, dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat.

Perusahaan berupaya menjaga kepercayaan masyarakat dengan menghindari praktik manajemen laba yang merugikan (Andriani & Arsjah, 2022).

Pada perusahaan sektor energi di Indonesia, Nadifah (2024) juga menyatakan ESG berpengaruh negatif dengan praktik manajemen laba. Namun, fenomena manajemen laba masih terjadi di Indonesia sampai pada saat ini seperti pada PT Timah Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, dan *startup* eFishery. Menggambarkan bahwa komponen *governance* atau tata kelola perusahaan masih belum mampu mengurangi praktik manajemen laba.

Menurut Prior et al. (2008), manajer diberi insentif oleh pemangku kepentingan untuk berbuat baik dengan mengadopsi praktik CSR dan ESG. Para penulis menyatakan bahwa manajer yang mempraktikkan manajemen laba umumnya menggunakan praktik yang bertanggung jawab secara sosial untuk mempertahankan dukungan pemangku kepentingan, dan bahwa aktivitas yang diarahkan pada keberlanjutan dapat digunakan sebagai alat yang kuat untuk mendapatkan dukungan dari pengguna akhir informasi keuangan. Studi oleh Almubarak et al. (2023) menyatakan pengungkapan ESG memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Selain itu, melalui pembagian tiga komponen ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola) dampak faktor lingkungan dan sosial terhadap manajemen laba ditemukan positif dan kuat. Habbash dan Haddad (2020) juga menemukan bahwa perusahaan di Arab Saudi yang aktif dalam CSR cenderung melakukan manajemen laba sebagai upaya membentuk citra positif di mata pemangku kepentingan. Akibatnya, ESG dapat meningkatkan masalah keagenan dengan menawarkan manajer lebih banyak

motivasi untuk melakukan manajemen laba untuk menyembunyikan praktik mereka dari pihak luar. Dalam studi Salewski dan Zulch (2012) melaporkan hubungan positif antara CSR dan manajemen laba. Para penulis menyatakan bahwa investasi dan pelaporan kegiatan CSR tidak mencerminkan kualitas pelaporan keuangan di antara perusahaan-perusahaan Eropa, dan bahwa perusahaan dengan indeks keberlanjutan yang besar memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk praktik manajemen laba dan melaporkan laba berkualitas rendah. Buertey et al. (2020) melaporkan hubungan CSR–manajemen laba yang positif menggunakan sampel 118 perusahaan Bursa Efek Johannesburg untuk tahun 2012–2015. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen menggunakan ESG secara oportunistik. Artinya, ESG dapat digunakan untuk meningkatkan kepentingan individu manajemen. Di Tiongkok, Zhang et al. (2021) mengungkapkan bahwa perusahaan yang mengadopsi pengungkapan CSR sukarela memiliki kecenderungan lebih besar terhadap keterlibatan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner. Hal ini menyebabkan hubungan CSR-manajemen laba yang positif. Sedangkan penelitian oleh Karina dan Soenarno (2022) menyatakan bahwa *sustainability reports* sektor perbankan di Indonesia, Malaysia dan Thailand tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Faktor kedua yang berdampak pada praktik manajemen laba adalah *financial distress*. Berdasarkan analisis peneliti, menggunakan data laporan keuangan pada tahun 2017-2023, PT Garuda Indonesia Tbk terdeteksi dalam kondisi kebangkrutan dengan menggunakan metode altman Z-Score sebesar 1,75, yang mencerminkan adanya masalah serius dalam kesehatan keuangan

perusahaan. Situasi ini kemungkinan disebabkan oleh manajemen yang tidak efisien dan beberapa faktor internal yang memengaruhi kinerja finansial.

Tabel 1. 1 Pengukuran *Financial distress* PT Garuda Indonesia Tbk 2017-2023

TAHUN	Z Score	Deskription
2017	1,75	<i>BANKRUPT</i>
EM 2018	1,95	<i>GRAY AREA</i>
REV2018	1,80	<i>BANKRUPT</i>
2019	2,01	<i>GRAY AREA</i>
2020	-0,11	<i>BANKRUPT</i>
2021	-2,32	<i>BANKRUPT</i>
2022	2,11	<i>GRAY AREA</i>
2023	0,26	<i>BANKRUPT</i>

Sumber : Data diolah dari Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia 2017-2023, IDX

Pada tahun 2018, meskipun ada sedikit perbaikan dengan Z-Score 1,95, perusahaan tetap berada dalam kategori "*Gray Area*," menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengatasi kesulitan, Garuda masih berjuang untuk keluar dari ancaman kebangkrutan. Di sinilah manajemen laba kemungkinan diterapkan, dengan tujuan memperbaiki citra keuangan perusahaan di mata pemangku kepentingan, setelah revisi laporan keuangan ternyata pada tahun 2018 masih terdeteksi kebangkrutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba AlmuBarak et al. (2023); Dzulfikar dan Firmansyah (2022); Li et al. (2020); Valaskova et al. (2021); Viana et al. (2022); Wiratno et al. (2023);. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) akan mendorong perusahaan melakukan manajemen laba untuk memperlihatkan kinerja perusahaan yang lebih baik agar dapat mempertahankan kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Chairunnisa et al. (2021) menyatakan bahwa *financial distress* yang semakin meningkat maka akan semakin memotivasi perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Hal ini dikarenakan kondisi perusahaan yang semakin menurun akan mendorong manajer perusahaan untuk menutupi laba perusahaan dengan melakukan praktik manajemen laba, sehingga akan menunjukkan kondisi laporan keuangan yang sehat bagi para investornya. Sedangkan Fitriza et al. (2021) menyatakan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Artinya peningkatan *financial distress* akan diikuti dengan penurunan manajemen laba. Hal ini disebabkan oleh perusahaan akan mempraktikkan manajemen laba saat kondisi perusahaan tidak tertekan (perusahaan dalam kondisi sehat) dan akan melakukan sebaliknya jika perusahaan dalam kesulitan. Hal ini disebabkan saat perusahaan dalam kondisi sehat, manajemen akan memperlihatkan kinerja terbaiknya guna mempertahankan reputasi perusahaan di hadapan investor dan pemegang saham. Namun, saat perusahaan dalam kondisi tidak sehat, manajemen akan fokus mengatasi kesulitan yang dihadapi dan tidak ingin melakukan manajemen laba guna tetap menjaga kepercayaan investor atas kondisi perusahaan yang masih baik-baik saja.

Hasil penelitian yang berbeda pula oleh Agustina dan Anita (2022); Wilamsari et al. (2022); Maryati et al. (2023) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini disebabkan oleh manajer perusahaan lebih memfokuskan pada menyelesaikan permasalahan keuangannya dan memilih untuk bertindak sesuai dengan kondisi

keuangan sesungguhnya agar kesulitan tersebut tidak mengakibatkan kebangkrutan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi manajemen laba adalah kepemilikan manajerial. Hal ini terlihat pada kasus eFishery, yaitu mantan CEO dan manajemen melakukan manajemen laba untuk menarik investor baru dan menghindari kebangkrutan. Persentase saham yang dipegang oleh manajemen aktif yang masih berpartisipasi dalam mengambil keputusan dalam suatu perusahaan, di antaranya adalah direksi dan jajaran komisaris, disebut sebagai kepemilikan manajerial (Agustia et al., 2019). Semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen, semakin besar pula dorongan bagi manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham lainnya. Hal ini terjadi karena manajemen laba ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan (Utari dan Sari, 2016).

Studi yang dilakukan oleh Pratomo dan Alma (2020) menunjukkan bahwa manajer yang memiliki saham perusahaan cenderung terlibat dalam praktik manajemen laba untuk meningkatkan kinerja keuangan yang dilaporkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai saham yang mereka miliki. Dengan demikian, motivasi laba pribadi menjadi salah satu pendorong utama bagi manajer untuk terlibat dalam manajemen laba. Sejalan dengan penelitian oleh Aryanti et al. (2017) serta Pricilia dan Susanto (2017) juga menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Didukung oleh penelitian Al-Fayoumi et al. (2010); Liu (2012) menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardhani (2012); Sari et al. (2023); Januri (2021) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Semakin rendah tingkat kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka probabilitas perusahaan untuk melakukan manajemen laba akan meningkat. Sedangkan Prameswari et al. (2022); Rohmah dan Meirini (2023) menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti masih menemukan adanya *research gap* dan kesenjangan yang terjadi di lapangan terkait dengan tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan khususnya pada sektor *non-financial* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari sisi *empirical gap*, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang belum konsisten, beberapa studi menemukan bahwa ESG berpengaruh positif terhadap manajemen laba, namun sebagian lainnya tidak menemukan pengaruh yang signifikan atau bahkan menunjukkan hubungan yang berlawanan. Hal serupa juga terjadi pada variabel *financial distress* dan kepemilikan manajerial, di mana masing-masing variabel menunjukkan hasil yang berbeda-beda tergantung pada konteks penelitian dan metode yang digunakan. Selain itu, terdapat pula *knowledge gap* di mana penelitian mengenai pengaruh ESG terhadap manajemen laba di Indonesia, khususnya pada sektor non-keuangan, masih tergolong terbatas. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian kembali dengan judul **“Pengaruh *Environmental, Social, and Governance (ESG) Index, Financial distress, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba*”**

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka peneliti membuat batasan masalah seperti berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *environmental, social and governance index* terhadap manajemen laba?
2. Apakah terdapat pengaruh *financial distress* terhadap manajemen laba?
3. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan fakta dan mengetahui hasil yang dapat dipercaya mengenai:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *environmental, social and governance index* terhadap manajemen laba
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *financial distress* terhadap manajemen laba
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermaaf dan berguna secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

- a. Penelitian ini memperluas aplikasi teori keagenan dan teori stakeholder dengan menjelaskan bagaimana faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), tingkat kesulitan keuangan (*financial distress*) dan kepemilikan manajerial memengaruhi hubungan antara manajer (*agen*) dan pemegang saham (*prinsipal*). Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan baru tentang cara perusahaan mengelola laba dalam upaya memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan, serta meningkatkan pemahaman tentang mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan.
- b. Penelitian ini menambah literatur yang membahas hubungan antara ESG, *financial distress*, kepemilikan manajerial dan manajemen laba. Hasilnya dapat menjadi dasar bagi peneliti lain yang ingin memperluas studi di bidang pelaporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam berbagai konteks pasar, termasuk di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat membantu manajemen perusahaan memahami pentingnya penerapan ESG dalam meminimalkan praktik manajemen laba. Hal ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan tata kelola, transparansi, dan tanggung jawab sosial demi menjaga reputasi dan kepercayaan investor, terutama dalam kondisi *financial distress*. Penelitian ini juga memberikan

panduan tentang bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial yang baik dapat membantu perusahaan memenuhi ekspektasi investor.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian dapat memberikan panduan bagi investor dalam mengevaluasi kinerja perusahaan yang terlibat dalam praktik manajemen laba dengan memperhatikan indikator ESG dan kondisi *financial distress*. Investor dapat menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana dan mengelola risiko secara lebih efektif. Selain itu, investor dapat memahami pengaruh kepemilikan manajerial yang baik dapat mengurangi risiko investasi dalam perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

c. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan yaitu:

1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada OJK dalam meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pelaporan keuangan yang terkait dengan penerapan ESG dan kondisi *financial distress*. Dengan memahami pengaruh kedua faktor tersebut terhadap praktik manajemen laba, OJK dapat memperbarui regulasi yang berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini dapat mendorong penerapan pengungkapan ESG yang lebih rinci serta meningkatkan sistem pelaporan untuk mengurangi risiko manajemen laba pada laporan keuangan.

2) Bursa Efek Indonesia (BEI)

Penelitian ini dapat membantu BEI dalam merancang kebijakan yang mendorong perusahaan untuk mematuhi standar pelaporan keuangan yang lebih baik dengan memperhatikan praktik ESG dan kondisi *financial distress*. BEI dapat meningkatkan mekanisme pelaporan berbasis ESG *index* dan memperkuat aturan pengungkapan dalam laporan keuangan yang mencerminkan kualitas kinerja keuangan dan *non-keuangan*. Selain itu, BEI dapat memperkuat regulasi yang mendorong perusahaan untuk menjaga kualitas keputusan manajerial yang dapat meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia bagi investor yang peduli terhadap tanggung jawab lingkungan dan tata kelola perusahaan

